

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Pengaruh ideologi-ideologi besar di dunia harus menjadi perhatian seksama dari semua komponen bangsa Indonesia, karena jika tidak maka Pancasila akan menjadi sebatas simbol minim implementasi dari warga negaranya. Gejala-gejala semakin mudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat seperti masih ada konflik sosial, ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial, tindak pembunuhan, pemerkosaan, perilaku korup pejabat negara, munculnya simbol-simbol Partai Komunis Indonesia (PKI), neoliberalisme, radikalisme dan terorisme serta perilaku lainnya menunjukkan bahwa Pancasila belum mengejawantah menjadi sikap dan perilaku dari warga negaranya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Setara Institute misalnya menyebut ada 10 kampus terpapar radikalisme (Nugroho, 2019), sementara hasil survei BNPT, menyebut 85% generasi milenial rentan terpapar radikalisme (Yahya, 2021).

Mengantisipasi berbagai macam tantangan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila tersebut, sekaligus sebagai salah satu bentuk tanggung jawab warga bangsa maka pendidikan ideologi perlu terus diupayakan sungguh-sungguh, dilestarikan, ditingkatkan intensitas dan kualitasnya sehingga tujuan yang dicita-citakan yaitu individu yang berwawasan Pancasila, bersikap sesuai Pancasila dan sekaligus memiliki perilaku sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kecerdasan, dan berkeadaban sejalan dengan nilai Pancasila dapat tercapai secara baik. Konsekuensinya diperlukan usaha secara sengaja dan konsisten untuk menginternalisasikan dan membudayakan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa baik di keluarga, masyarakat maupun di dunia pendidikan.

Harus diakui meskipun sudah 76 tahun Indonesia merdeka, namun amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 belum mampu diwujudkan bangsa Indonesia dengan baik. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa terjadinya korupsi di BUMN disebabkan oleh prinsip *Good Corporate Governance* yang belum terimplementasikan dengan baik (Aslam, 2022). Transparency International Indonesia mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Januari 2022 posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara (Wibowo, 2022). Berbagai persoalan bangsa Indonesia masih terus menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia seperti masih adanya kesenjangan sosial yang cukup tinggi, masih terus terjadinya konflik-konflik sosial dalam masyarakat, melunturnya nilai-nilai budaya bangsa pada sebagian generasi muda khususnya dan tidak ketinggalan juga pada generasi tua.

Dalam kehidupan masyarakat juga masih terdapat individu atau sekelompok orang yang memiliki keyakinan terhadap ideologi lain dan berkeinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi selain Pancasila seperti ideologi yang berdasarkan pada atas nama agama yang diyakininya, liberal maupun komunis. Dalam satu penelitian disebutkan bahwa berkembangnya radikalisme di Indonesia terutama disebabkan karena latar belakang agama individu, dan sikap tersebut terutama ditanamkan pada generasi muda dengan rentang umur 17 sampai 24 tahun (Winarni, 2020). Meskipun jumlahnya tidak signifikan namun jika dibiarkan maka bisa menjadi bibit-bibit yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan eksistensi Pancasila.

Implementasi nilai Pancasila dinilai belum secara baik diwujudkan dalam praktik hidup bermasyarakat, dan bernegara. Pancasila tentu tidak cukup sekedar diklaim, dihafal, diupacarakan tetapi harus secara terus menerus dan sungguh-sungguh untuk dibudayakan dan diinternalisasikan dalam kehidupan, karena tanpa kesungguhan dan konsistensi untuk terus membudayakan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bisa jadi hanya sebatas simbol, sekedar cerita sejarah masa lalu dan tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan mewujudkan tujuan bernegaranya. Permasalahan bangsa Indonesia saat ini sangat terkait dengan bagaimana karakter warga negaranya yang

berPancasila, seperti karakter untuk peduli, toleran, ikhlas tanpa pamrih, suka bergotong royong atau bekerjasama, yang sampai dengan saat ini masih belum menjadi karakter kuat dan unggul dari seluruh warga bangsa Indonesia yang berPancasila. Masih sering ditemukan karakter tidak peduli, tidak tulus ikhlas, individualistik, politisasi atas dasar agama, suku, ras maupun antar golongan, penyebaran fitnah atau hoax, aksi terorisme dan radikalisme serta lain sebagainya.

Reformasi sudah digulirkan sejak tahun 1998, namun disadari bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa seolah belum mendapatkan tempat yang seleyaknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai kondisi yang mempertontonkan sikap dan perilaku yang jauh dari nilai-nilai Pancasila masih sering kita dengar dan kita rasakan dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Sehingga kiranya mendesak bagi kita untuk melakukan usaha yang terencana dan terprogram sistematis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.

Semua pihak tidak terkecuali Perguruan Tinggi dituntut tanggung jawab bersama untuk ikut mengembangkan, mensosialisasikan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila kepada mahasiswanya yang dikemas dalam mata kuliah umum wajib kurikulum seperti mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sehingga diharapkan dapat membentuk karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang diyakini kebenarannya. Mohamad Nasir menyatakan bahwa pendidikan mempunyai peran penting untuk menghasilkan lulusan yang berPancasila, yang memiliki pengetahuan, memahami persoalan bangsa dan ikut berkontribusi dalam mengatasi masalah tersebut dalam membangun bangsanya (Fadloli, 2017). Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan mengemukakan bahwa dunia mengalami perubahan terutama perubahan dalam bidang teknologi yang sangat cepat, sehingga harus diantisipasi oleh semua pihak, disikapi secara bersama-sama dengan memperkuat nilai karakter bangsa Indonesia. Melalui media seperti lewat budaya, musik atau film perlu menjadi kewaspadaan karena adanya infiltrasi ideologi asing yang nyata adanya. Menjadi penting penguatan ideologi Pancasila

melalui pendidikan sehingga kepribadian bangsa yang berPancasila tidak hilang karena pengaruh adanya infiltrasi ideologi asing lainnya. (Fadloli, 2017).

Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi berbagai tantangan, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana Ideologi Pancasila bukan hanya dipahami, diyakini tapi juga bagaimana diimplementasikan, bagaimana menghadirkan kerangka operatifnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Latif (2020) mengemukakan bahwa untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai karakter dan haluan bersama sebagai “titik temu”, “titik tumpu”, dan “titik tuju” dari bangsa dan negara Indonesia maka diperlukan suatu usaha untuk menanamkan atau membudayakan Pancasila secara terus-menerus, terencana dan terpadu. Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar filsafat negara (*philosophische grodslag*), pandangan dunia bangsa Indonesia (*weltanschauung*) tentu menuntut untuk terus diperjuangkan, diusahakan secara sungguh-sungguh untuk dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soekarno (1947, p. 39) bahwa:

Tetapi Saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya, bahwa tidak ada satu *weltanschauung* dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi *realiteit* dengan sendirinya. Tidak ada satu *weltanschauung* dapat menjadi kenyataan, menjadi *realiteit*, jika tidak dengan perjuangan!.

Pendekatan indoktrinasi dengan model Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang pernah diimplementasikan dimasa pemerintahan Orde Baru dinilai kurang tepat dan gagal dalam mewujudkan warga negara yang dicita-citakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pembudayaan Pancasila sebagai ideologi bangsa melalui P4 dianggap sarat kepentingan penguasa. Hamengku Buwono X menyatakan bahwa: “Pancasila sebagai dasar negara Indonesia selalu menjadi bagian dari perdebatan ideologis dan politik yang bersifat laten. Pancasila menjadi legitimasi sikap politik, baik oleh pemerintah maupun kaum oposisi, hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka akan selalu dipengaruhi oleh pergeseran rezim yang berkuasa dan konstelasi politik” (Buwono X, 2021).

Karnavian (2017). menyatakan bahwa: "Tanpa disadari semenjak 1998 liberalism telah teradopsi, demokrasi Pancasila seolah-olah mulai redup untuk

diperkenalkan dengan baik”. Kaelan dalam bukunya yang berjudul “Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila” menuliskan bahwa Pancasila dewasa ini dalam pandangannya seolah ditenggelamkan, termarginal dan dalam praktiknya seolah sebatas rumusan verbal dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sedangkan secara normatif dan praktiknya justru mendasarkan pada filsafat ala liberal. Dalam masyarakat maupun elit negara menunjukkan pada rapuh dan kurang kuatnya bangsa ini tentang pemahaman dan keyakinan terhadap Pancasila sebagai filosofis bangsanya (Kaelan, 2015, p. 7). Kesan dimarjinalkannya Pancasila bahkan bisa dilihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 37 Ayat (2) terkait dengan kurikulum Pendidikan Tinggi, dimana dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit disebutkan mata kuliah Pendidikan Pancasila, disana hanya disebutkan bahwa kurikulum di Perguruan Tinggi mewajibkan untuk memuat agama, kewarganegaraan, dan bahasa.

Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi yang dilakukan secara indoktrinatif dari pemerintah kepada generasi muda dinilai tidak berhasil karena metodenya yang tidak sesuai dengan hakikat dari pendidikan (Tilaar, 2009). Lebih lanjut Winataputra (2008) menyatakan bahwa pendidikan Pancasila mengalami dinamika yang dicirikan dengan konseptualisasi yang lemah, penjabaran yang kurang konsisten, dan proses pembelajaran nilai Pancasila yang masih menjadi persoalan. Oleh karena itu, pendidikan ideologi Pancasila dipandang sebagai keniscayaan untuk tetap tegak dan tumbuhnya bangsa Indonesia yang majemuk, sebagaimana dikemukakan oleh Al Muchtar (2016, p. 464) bahwa diperlukan pendidikan ideologi Pancasila, dan diperlukan penguatan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi Pancasila.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ideologi sebagai sesuatu yang penting, karena berbagai peristiwa yang belum mencerminkan individu yang berwawasan Pancasila, memiliki sikap dan perilaku yang berPancasila hingga saat ini masih terus saja terjadi, seperti perilaku korupsi, aksi kekerasan, radikalisme maupun aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia meskipun pelakunya sudah

ditangkap bahkan tidak sedikit yang juga harus ditembak mati polisi, namun aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama misalnya tidak juga kunjung surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai aksi teror tersebut didasari oleh ideologi yang kuat yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (Tim Forum Kajian Ilmiah & Realita, 2009).

Latif (2012) berpandangan bahwa “pembumian nilai-nilai Pancasila seolah berayun dari kegiatan penataran P-4 ke kegiatan sosialisasi empat pilar, tidak diimbangi dengan beragam metodologi dan perluasan imajinasi pematrian nilai Pancasila itu kedalam pembentukan karakter Indonesia yang berPancasila”. Proses pembelajaran selama ini cenderung dirancang secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi seluruh masyarakat, berfokus pada penyampaian konten sebanyak mungkin guna mencapai tuntutan dari kurikulum, sedangkan proses pembelajaran kurang mendapatkan perhatian, dibandingkan dengan orientasi pada hasil belajar. Implikasinya proses pembelajaran masih bertumpu pada ranah pengetahuan atau *knowledge* yang lebih banyak mengembangkan kemampuan menghafal, kemampuan berpikir dan pengembangan nilai-nilai Pancasila kurang mendapat kesempatan untuk menumbuhkan pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila melalui pembelajaran.

Pendidikan Pancasila selama ini materinya dinilai terlalu idealis dan utopis, sering terjadi penggulungan materi, terlalu indoktrinatif, disampaikan secara monoton, banyak pengetahuan hafalan tetapi tidak melaksanakannya, serta sarat dengan kepentingan penguasa (Santoso et al., 2003). Pendidikan nilai dan moral cenderung terabaikan dalam proses pembelajaran, dan implikasinya mahasiswa kurang memiliki pengalaman dalam pembelajaran nilai dan moral sehingga kurang kuat dalam ketahanan kecerdasan berideologi Pancasila. Pancasila idealnya tidak hanya dipahami oleh setiap warga bangsa, tetapi Pancasila hendaknya dapat diamalkan sila-silanya, sebagaimana dikemukakan oleh Jusuf Kalla bahwa guna menjaga bangsa Indonesia ini, ideologi Pancasila harus dipahami semua baik oleh generasi muda maupun generasi tua dan juga harus diimplementasikan dalam kehidupan (Nadlir, 2017).

Proses pembelajaran baik di jenjang persekolahan maupun Perguruan Tinggi dinilai belum menyentuh pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill (HOTS)*. Mahasiswa dinilai kurang terlibat dalam memecahkan masalah aktualisasi ideologi Pancasila, sehingga komitmen terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila kurang optimal untuk dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan. Hal ini memungkinkan munculnya sikap permisif di kalangan mahasiswa terhadap Pancasila. Pancasila oleh mahasiswa dianggap sebagai informasi normatif, bukan sebagai kekuatan nilai yang harus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya model pembelajaran ideologi Pancasila belum banyak bervariasi, seringkali masih berfokus pada pengetahuan.

Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan oleh sebagian orang dianggap kurang berhasil dengan baik dalam membentuk warga bangsa yang memiliki nilai-nilai budi pekerti yang luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai bukti misalnya laporan penelitian yang dilakukan LIPI pada tahun 2006, ada 86% mahasiswa dari lima kampus di Pulau Jawa tidak menerima Pancasila dan menghendaki diterapkannya atas nama syariat Islam, pada tahun 2011 lima kampus di Indonesia terindikasi adanya peningkatan pemahaman fundamentalisme keagamaan dan konservatif pada mahasiswa di kampus umum (lipi.go.id, 2016). Pada tahun 2015-2020 Komnas Perempuan mendapatkan 276 pengaduan kasus kekerasan seksual terjadi di kampus, survei yang dilakukan Mendikbud Ristek (2019) bahwa kampus justru menempati posisi ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual sebanyak 1.596, berikutnya jalanan sebanyak 3.396 dan di transportasi umum sebanyak 1996 (Komnas Perempuan RI, 2021). Penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan BIN pada tahun 2017 di 15 propinsi terdapat 39 persen mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme, sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar menyatakan bahwa proses radikalisasi dengan memanfaatkan dunia maya pada 2 tahun terakhir meningkat 14%, dengan karakteristik radikal terorisme sendiri diantaranya anti Pancasila, intoleran, aksi kekerasan (Admin, 2022).

Raharjo, 2022

PENDEKATAN PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM MKWU DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa pendekatan yang diterapkan dalam penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila melalui mata kuliah wajib umum agar menjadi warga negara yang *good and smart citizenship* sesuai dengan nilai Pancasila dinilai belum berhasil dengan baik. Sebagaimana pernah dilakukan dimasa orde baru, Pancasila dinilai hanya berlangsung *unilateral* yang datang dari negara dan tidak memungkinkan adanya perbedaan pandangan, pendidikan seakan dilakukan secara otoriter hanya demi kepentingan penguasa, sehingga kurang dapat mencerdaskan warganya. Terdapat tiga faktor mengapa Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum Kurikulum dinilai gagal melakukan sosialisasi dan diseminasi demokrasi, yaitu *pertama* secara substantif mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. *Kedua*, pendekatan pembelajaran yang digunakan lebih bersifat indoktrinatif, regimentatif (bersifat kekuasaan), monologis dan tidak partisipatif, dan yang *ketiga*, substansi mata pelajaran atau mata kuliah yang cenderung lebih teoretis dan kurang implementatif dalam praktik kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa (Winarno, 2011).

Menurut Hantonian (1996) dalam Somantri dan Winataputra (2017, pp. 10–11) menyatakan bahwa sebagai suatu disiplin ilmu yang berbentuk sistem pengetahuan yang terpadu atau *integrated knowledge system*, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki logika internal atau struktur keilmuan yang mencakup tiga dimensi ineteraktif, yakni *pertama*, sebagai kajian ilmiah tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan (*academic civics*), *Kedua*, merupakan pemberdayaan sosial kultural kewarganegaraan dalam masyarakat (*community civics*), dan *ketiga*, merupakan pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan baik dalam pendidikan formal maupun non formal (*school civics*). Secara keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki metodologi sikap, pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan, khususnya terkait pada kewajiban dan haknya sebagai warga negara dalam konteks interaksi diantara warga negara, interaksi antara negara dengan warga negaranya dalam makna statis dan dinamis.

Somantri dan Winataputra (2017, pp. 4–5) menyatakan bahwa secara filosofis komponen pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembelajarannya dikembangkan dalam konteks filsafat pendidikan rekonstruktif (*reconstructed philosophy*) yang menempatkan Pancasila sebagai *central value* tentu menuntut pendidik menguasai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memanfaatkan secara eklektis penguasaan teori keilmuan (*disipline theories*), penguasaan psikologi belajar (*cognitivetheories*) dan teori Gestalt (*Gestalt Field Theories*) seperti pendekatan yang merentang diri pendekatan ekspose (*expository approach*) sampai pendekatan penelitian (*inquiry approach*). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu seorang pendidik dituntut untuk dapat mengembangkan diri sebagai guru atau dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang profesional yang mencerminkan dirinya sebagai pengaruh belajar (*director of learning*), berperan dan bersikap sebagai a) ilmuwan (*scientist*), b) berdedikasi penuh dan menguasai bidangnya (*dedicated and well informed teacher*). Untuk itu maka dalam rangka peningkatan profesionalisme maka semua pendekatan pembelajaran yang relevan untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi pusat perhatian dalam perancangan, implementasi, dan akuntabilitas program pendidikan sarjana dan profesi dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Tantangan terbesar dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan pada dasar dan ideologi Pancasila yakni dalam mengembangkan pendidikan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila (Sapriya, 2007, p. 322). Pengembangan pendidikan dan kembali membudayakan nilai Pancasila merupakan satu hal yang penting, karena krisis yang pernah menimpa bangsa Indonesia di tahun 1998 misalnya menjadi bukti kegagalan atau belum berhasilnya dalam membudayakan, dan mensosialisasikan Pancasila itu sendiri. Kondisi Pandemi Covid-19 yang hampir melanda seluruh dunia termasuk Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana ideologi Pancasila diinternalisasikan dan dibudayakan kepada seluruh masyarakat termasuk kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa.

Raharjo, 2022

PENDEKATAN PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM MKWU DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kondisi ini memaksa segala lini kegiatan termasuk pendidikan harus terhambat dan harus dialihkan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melakukan proses pembelajaran (Widiyanto et al., 2021).

Pembelajaran dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentu bukan tanpa hambatan, penelitian yang dilakukan Maudiarti (2018) menyebutkan bahwa faktor penghambat penerapan *e-learning* lebih pada lemahnya dukungan kebijakan dan infrastruktur TIK yang belum memadai. Tantangan lain adalah bagaimana dengan pendidikan nilai atau karakter bagi mahasiswa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun teknologi yang muncul menawarkan berbagai peluang untuk kolaborasi di lingkungan pembelajaran sinkron dan asinkron, pembelajaran online di seluruh dunia menghadapi tantangan yang dapat membatasi atau menghalangi penerapan teknologi ini (Beldarrain, 2006).

Dunia pendidikan di Indonesia tidak terkecuali perguruan tinggi dituntut untuk bisa menguasai dan mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajarannya agar dapat menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas serta menguasai teknologi (Istiyarti & Purnama, 2014). Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi diharapkan dihasilkan lulusan yang cerdas dan baik, bukan saja memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik sebagai warga negara yang berPancasila. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona covid-19, bahwa proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dengan adanya kemajuan teknologi informasi (Pakpahan & Fitriani, 2020). Riset membuktikan bahwa era digital memberi peluang positif pada implementasi pendidikan karakter (Triyanto, 2020). Kemajuan teknologi informasi juga memberikan tantangan tersendiri bagi dosen dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada mahasiswa. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara efektif, kreatif dan inovatif juga ikut menjadi kendala keberhasilan pembelajaran secara online atau daring.

Raharjo, 2022

**PENDEKATAN PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM MKWU
DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Universitas Negeri Jakarta termasuk didalamnya dosen dan mahasiswa dituntut untuk mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik dalam pelaksanaan perkuliahan mata kuliah wajib umum seperti mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan jumlah kelas berdasarkan jadwal tahun 2022 cukup banyak yakni 132 kelas. Ketersediaan dan kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter yakni memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai warga negara yang cerdas dan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan ideologi Pancasila melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan harus terus ditanamkan kepada setiap mahasiswa, dengan penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kreatif, inovatif dan efektif.

Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia yang mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia haruslah dipahami sebagai hal yang penting dalam pendidikan karakter (Koesoema A, 2007, p. 207). Lebih lanjut Tilaar (2009, p. 171) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sangat strategis dalam menginternalisasikan dan pembudayaan ideologi Pancasila serta menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan modal kultural yang positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Merebaknya kekerasan yang bernuansa agama juga menunjukkan bahwa pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya nilai ketuhanan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, ketuhanan yang belum berkebudayaan yang dapat menjadi *rahmatan lil alamin* (kasih sayang bagi seru sekalian alam) yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengedepankan semangat persatuan dan keadilan sosial. Bahkan beberapa gerakan radikal yang berafiliasi dengan gerakan ISIS yang bermaksud mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain sudah mulai merambah untuk merekrut kaum intelektual kampus. Saifuddin (2011) mengemukakan jika fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa benar adanya, sebagai sesuatu yang dapat dipegang dan dipelajari (*malmus wa magru*). Hal ini tentu perlu dibuat sistem proteksi yang dapat mencegah paham-paham radikal yang kontraproduktif,

karena jika paham tersebut berhasil masuk ke área kampus, maka hal tersebut bisa sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Perguruan Tinggi seyogyanya bukan hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi kampus juga dapat menjadi pusat kebudayaan, benteng keutuhan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Tantangan terbesar bagi pendidikan nasional Indonesia adalah belum terlalu baiknya kualitas dan relevansi pendidikan. Di era global saat ini yang ditandai dengan perkembangan Ipteks yang penuh tantangan, dan persaingan, serta munculnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015 merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia, termasuk oleh Perguruan Tinggi, karena Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan dituntut mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, bahkan lebih luas lagi di dunia global. Hal tersebut tentunya harus dihadapi dengan meningkatkan mutu pendidikan tinggi sebagai lembaga kependidikan yang dituntut dapat menciptakan sumber daya manusia memiliki kualitas, berkarakter Pancasila dan unggul dalam berbagai segi kehidupan.

Tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia hingga sampai saat ini belum dapat diwujudkan dengan baik, meskipun kita sudah bergonta-ganti kurikulum. Pembelajaran di sekolah bahkan di Perguruan Tinggi dirasa belum mampu mewujudkan secara utuh mahasiswa lulusan yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Proses pendidikan dinilai masih menitikberatkan pada capaian secara kognitif. Sementara, aspek afektif, spiritual dan keterampilan sebagai warga negara yang baik pada diri mahasiswa yang merupakan bekal kuat untuk hidup di masyarakat belum optimal dikembangkan dengan baik. Oleh sebab itu, pendidikan ideologi Pancasila perlu dikembangkan di Perguruan Tinggi, karena kampus sebagai pusat perubahan haruslah secara sungguh-sungguh, konsisten dengan beragam pendekatannya melakukan pendidikan yang sejalan dengan nilai -nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.

Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dengan Tri Dharmanya yakni melalui pendidikan, kegiatan penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat, sehingga mampu dalam menghadapi tantangan global tersebut. Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dituntut memaksimalkan proses pendidikan yang membawa capaian lulusan yang berkualitas dengan kompetensi personal, sosial, moral, dan profesional yang dimilikinya. Melalui kegiatan penelitiannya, Pendidikan Tinggi diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap institusinya serta secara nyata memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan, pembaharuan dan inovasi bidang Ipteks. Dengan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, keberadaan pendidikan tinggi harus dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat sekitarnya. Kesemuanya itu pada hakekatnya merupakan perwujudan nilai-nilai ideologi Pancasila, yang harus diimplementasikan oleh seluruh civitas akademika tidak terkecuali mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Aktualisasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang datang dari dalam (internal) negeri sendiri maupun tantangan dari luar (eksternal) yang tidak mudah. Secara internal terdapat penurunan keyakinan akan efektivitas Pancasila hal tersebut muncul dimana terdapat satu kesenjangan yang tajam, antara tataran idealitas Pancasila dengan realitas yang hidup dalam masyarakat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Belum lagi tingkat pemahaman atau pengetahuan tentang Pancasila yang masih belum baik di sebagian masyarakat kita, dan diperparah dengan praktik/tindakan masyarakat yang masih belum mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang disepakai sebagai ideologi dan dasar negara. Secara eksternal pengaruh nilai-nilai budaya luar akibat arus globalisasi dapat mengakibatkan pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Latif, 2020). Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas sesungguhnya kita memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar dan ideologi negara yang harus terus dilakukan pembudayaan dan diinternalisasikan nilai-nilai Pancasila, antara lain melalui pendidikan dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

Problem besar bangsa Indonesia sampai dengan saat ini adalah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang belum menunjukkan sebagai bangsa yang

berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, padahal pembangunan karakter sudah cukup lama diselenggarakan dengan segala upaya dan bentuknya terutama dipersekolahan baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi dan di masyarakat. Membangun karakter seharusnya membangun suatu kebajikan (*goodness*) dalam arti berpikir, berperasaan, dan berperilaku baik atau memiliki (*think good, feeling good, and behavior good* sesuai dengan Pancasila).

Secara filosofis pembangunan karakter bangsa sebagai kebutuhan asasi, hal ini karena dengan karakter yang kuat dan unggul sebuah bangsa mampu melakukan proses pembangunan dengan baik. Secara ideologis pembangunan karakter bangsa merupakan upaya perwujudan membumikan ideologi Pancasila kedalam praksis di masyarakat maupun praksis dalam ketatanegaraan (Budimansyah, 2010, p. 2). Dengan demikian karakter yang unggul dan kuat yang berdasarkan Pancasila tersebut akan mampu membawa pada proses pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan tujuan nasional yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dimensi keyakinan, pengetahuan dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan secara baik dan konsisten dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, strategi maupun metode yang sesuai.

Lickona (2013, pp. 20–28) menyatakan ada sebagian gejala kemunduran kesadaran warga yang butuh memperoleh atensi supaya pertumbuhan moral para pemuda berganti ke arah yang lebih baik, yakni: 1) kekerasan serta aksi anarkhi, 2) pencurian, 3) Aksi kecurangan, 4) ketidaktaatan pada ketentuan yang berlaku, 5) tawuran, 6) ketidaktoleranan, 7) penggunaan bahasa yang tidak baik, 8) penyimpangan seksual, 9) perilaku perusakan terhadap diri. Kemunduran kesadaran tersebut, merupakan problem dan tantangan yang secara umum dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia ini, dan tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila juga tidak lepas dari hal tersebut.

Indikasi negatif tersebut disadari masih muncul di sebagian masyarakat, elit, dan juga para pelajar maupun mahasiswa. Oleh karena itu, upaya yang serius dan terpadu dalam menanamkan karakter, budi pekerti pada mahasiswa, menjadi

persoalan dan tugas penting yang harus dilakukan oleh segenap komponen bangsa tidak terkecuali harus dilakukan di persekolahan, Perguruan Tinggi, disamping peran keluarga, masyarakat. Oleh karena itu, penting pendidikan ideologi Pancasila, untuk membentuk karakter warga negara yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dalmeri (2014) mengemukakan pendapatnya terkait tujuan dari pendidikan karakter yang dilakukan yakni untuk menanamkan kebiasaan yang baik, memberikan pemahaman yang baik, sehingga mahasiswa dapat merasakan dan mampu melakukan tindakan yang baik sesuai dengan ideologi Pancasila, dan ini sejalan dengan misi pendidikan akhlak atau moral yang berPancasila.

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa landasan kehidupan bangsa yang tetap eksis dalam seni, peradaban, kebutuhan agama, atau dalam cerita harus diperhatikan dalam pendidikan karakter. Kondisi tersebut harus sejalan dengan semangat kebangsaan yang bersih, tertib, dan harmonis lahir dan batin. Tidak hanya kondisi yang sudah ada dan berjalan dengan baik harus diikuti, tetapi juga harus sejalan dengan kondisi era baru yang menguntungkan dan sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa (Dewantara, 2013).

Lickona (2013) menegaskan berartinya pendidikan karakter ialah: 1) metode terbaik buat menjamin mahasiswa mempunyai karakter, 2) prestasi akademik dapat meningkat, 3) mahasiswa sebagian tidak bisa membentuk kepribadian di tempat lain, 4) metode untuk mahasiswa bisa hidup dalam warga yang beraneka ragam, 5) untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan masalah moral, ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran aktivitas intim, serta etos kerja (belajar) yang rendah, 6) persiapan untuk menyambut sikap di tempat kerja, serta (7) menanamkan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari kerja peradaban. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak semata-mata pada kemampuan kognitif, tetapi juga menuntut perhatiannya pada kemampuan afektif dan psikomotorik sebagai satu kesatuan yang utuh. *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menyebutkan terdapat 4 (empat) pilar pendidikan untuk pendidikan abad-21 sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, penting dan idealnya ada pembelajaran dan kurikulum yakni belajar mengetahui, belajar mencari tahu (*learning to know*),

belajar berbuat, melakukan sesuatu (*learning to do*), belajar menjadi seseorang, menjadi diri yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia (*learning to be*) dan belajar hidup bersama, berkolaborasi dengan orang lain (*learning to live together*) (Hnamte & Lalrinzuali, 2021).

Pembangunan karakter warga negara yang baik masih menjadi persoalan yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan terutama di jenjang pendidikan baik dasar, menengah maupun tinggi. Seperti yang dipopulerkan Lickona (2015), yaitu merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa karakter baik (*Good Character*) berkaitan dengan gagasan hidup yang baik atau penuh kebajikan, yakni berperilaku secara wajar, baik terhadap pihak lain (Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, dan alam semesta), dan perilaku menyayangi serta baik terhadap diri. Lickona (2015) membagi menjalani kehidupan yang baik menjadi dua kategori yakni pertama kebajikan yang berorientasi pada diri sendiri seperti pengendalian diri dan kesabaran (moderasi), dan kedua, kebajikan berorientasi pada orang lain seperti kemurahan hati dan perasaan baik tentang diri (kasih sayang). Lebih lanjut menurut Lickona (2013, p. 84) ada tiga elemen karakter unggul yang saling terkait yang tidak beroperasi sebagai bagian yang terpisah melainkan meresap dan mempengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur tersebut adalah pengetahuan (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*) dan tindakan (*moral behavior*).

Pendidikan Ideologi Pancasila pada Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membekali mahasiswa dengan wawasan intelektual dan keterampilan yang diperlukan bagi mereka untuk terlibat secara intelektual dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek dalam masyarakat, karena inilah yang dimaksudkan untuk mengembangkan karakter mahasiswa yang kuat dan bermoral. Hal ini dimaksudkan agar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat membantu terciptanya budaya kewarganegaraan yang lebih menghargai. Kebudayaan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan egaliter, saling menghormati dan toleransi, perilaku kooperatif, solidaritas, dan rasa kebersamaan, adalah salah satu komponen *civic virtue*. Dalam rangka mengembangkan

kehidupan “*civil society*” Indonesia yang sejalan dengan cita-cita negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dipandang bahwa seluruh aspek moralitas kewarganegaraan berperan dalam membentuk warga negara yang baik, yang demokratis yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Kajian tentang bagaimana pendekatan pendidikan ideologi Pancasila dalam pengembangan kurikulum pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu Mata kuliah Wajib Umum (MKWU) yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa di Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) guna membangun warga negara yang berkeadaban dan cerdas berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila menjadi satu hal yang penting bagi keberlangsungan suatu bangsa yang berPancasila. Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dihadapkan pada tantangan untuk semakin menumbuhkembangkan dan memperkuat ideologi Pancasila, dengan pendidikan ideologi Pancasilanya, sehingga diharapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dapat terwujud dengan baik.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan tidak hanya berfokus pada penggunaan pendekatan ekspositori, atau pendekatan yang berpusat pada dosen (*Teacher Centered Learning*), melainkan pembelajaran yang mendorong mahasiswa dapat menemukan sendiri atau *discovery*, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*). Hal ini sesuai dengan pandangan Mas’adah (2019) bahwa dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran yakni pendidikan yang diselenggarakan atas dasar semangat penemuan atau *discovery*. Pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan juga diharapkan mengedepankan pada pendekatan kontekstual, yang membantu dosen untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam praktik kehidupan mahasiswa sehari-hari. dan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah yang dicirikan

dengan proses pengamatan, bertanya, pengumpulan data dan informasi, proses mensintesis, menganalisis, diskusi dan berikutnya kegiatan mengkomunikasikan.

Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) merupakan mata kuliah yang penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadaban sesuai dengan nilai Pancasila, sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi maka kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Termasuk diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa baik Program Diploma maupun Program Sarjana di Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian terkait pendekatan pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum Kurikulum di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menarik untuk dikaji hal ini karena UNJ merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri eks IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang berada di Ibu Kota Jakarta, yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi dengan tetap menjaga dan mengembangkan jati diri sebagai Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang menghasilkan pendidik yang professional dan berkarakter Pancasila. Berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNJ tahun 2020-2045 di tahun 2019 memiliki jumlah mahasiswa baru sebanyak 5.754 mahasiswa dengan latar belakang budaya, daerah, agama yang beragam, dan dengan jumlah dosen sebanyak 863 dengan 585 atau 66% bergelar magister, dan sebanyak 278 atau 32% bergelar doktor (RPJP UNJ, 2020). Hal tersebut, tentu menunjukkan bahwa bukan hal yang mudah untuk melaksanakan pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum bagi seluruh mahasiswa, sehingga dihasilkan lulusan yang professional dan berkarakter Pancasila. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat mengembangkan kurikulum yang relevan

dan adaptif sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tuntutan perkembangan zaman.

Pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi penting dilakukan karena tidak lepas oleh beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah, mengantisipasi perkembangan IPTEKS yang terjadi dewasa ini, termasuk perkembangan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan, dan tuntutan dunia di masa depan yang penuh tantangan. Kurikulum idealnya dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya mulai dari tujuan apa yang ingin dicapai, materinya apa untuk mencapai tujuan, bagaimana proses pembelajarannya dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum, sehingga idealnya dapat dirumuskan, dipahami dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh pemegang kebijakan, dosen termasuk mahasiswa, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan dengan baik. Kurikulum Pendidikan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) idealnya berorientasi pada capaian standar minimal capaian pembelajaran.

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan efektif serta dapat melakukan proses evaluasi agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian penelitian terkait dengan bagaimana pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu Mata Kuliah Wajib Umum Kurikulum di Universitas Negeri Jakarta dalam pengembangan kurikulum MKWU menjadi satu hal yang sangat penting bagi terwujudnya mahasiswa sebagai generasi penerus serta sebagai warga negara Indonesia yang berPancasila. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini yakni berfokus pada pendidikan ideologi Pancasila, dimana sebagai sebuah ideologi Pancasila secara konsisten dan terus menerus harus dijaga, dirawat dan ditumbuhkembangkan sebagai ideologi bangsa Indonesia antara lain melalui mata

Raharjo, 2022

PENDEKATAN PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM MKWU DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kuliah wajib umum. Berikutnya, bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan pendidikan ideologi Pancasila yang dinilai relevan, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta efektif dalam menginternalisasikan, membudayakan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa memiliki pengetahuan, wawasan Pancasila yang baik, memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh akan kebenaran dan kebaikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, memiliki sikap yang mencerminkan nilai luhur Pancasila dan yang tidak kalah penting berperilaku atau bertindak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia yang beragam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya:

- 1) Bagaimana keterkaitan pendidikan ideologi Pancasila dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi?
- 2) Bagaimana muatan materi pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun warga negara yang berkarakter?
- 3) Bagaimana pendekatan pendidikan ideologi Pancasila diimplementasikan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang berkarakter?
- 4) Bagaimana model aplikatif pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi?
- 5) Bagaimana pendidikan Ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam membekali mahasiswa untuk memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif ideologi lain?.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah memperoleh gambaran bagaimana pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila dalam mata kuliah wajib umum kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Jakarta.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis keterkaitan antara Pendidikan ideologi Pancasila dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara yang berPancasila di Perguruan Tinggi.
- 2) Mengidentifikasi muatan materi pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun warga negara yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 3) Mendeskripsikan implementasi pendekatan pendidikan ideologi Pancasila dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara yang berPancasila di Perguruan Tinggi.
- 4) Menemukan model aplikatif pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara yang BerPancasila di Perguruan Tinggi.
- 5) Menganalisis peran pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam membekali mahasiswa terhadap pengaruh negatif ideologi asing.

1.4. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Secara akademis, diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan yaitu memperkuat teori-teori dan kurikulum pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah wajib umum pada kurikulum Pendidikan Tinggi. Menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengembangan kurikulum pendidikan ideologi Pancasila, meneliti kemungkinan faktor lain dalam meningkatkan karakter warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. Dari Segi Kebijakan

Negara dan segenap komponen bangsa bertanggung jawab bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara terus disosialisasikan, dibudayakan dan diinternalisasikan kepada seluruh mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang berPancasila antara lain melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum kurikulum. Sehingga menuntut kebijakan yang secara kontinu, integratif, komprehensif dan konsisten untuk mengembangkan kurikulum, melakukan pendidikan ideologi Pancasila dengan menggunakan multi pendekatan, strategi, metode, media, dan multi disiplin ilmu.

3. Secara Praktis

Penelitian ini secara praksis memberikan kontribusi kepada:

- 1) Dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, untuk dapat melakukan pendidikan ideologi Pancasila kepada mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan guna membangun karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, strategi, metode, model dan media yang efisien dan efektif.
- 2) Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan pendidikan ideologi Pancasila melalui kedua

mata kuliah wajib umum tersebut secara tepat, mahasiswa akan memiliki keyakinan yang baik akan kebenaran dan kebaikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan wawasan Pancasila, memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki keterampilan/berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang berPancasila.

- 3) Pengelola Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, dapat secara kontinu, berkesinambungan dan komprehensif melakukan perbaikan, pengembangan, sosialisasi, dan pelatihan terkait dengan perangkat pembelajaran, materi, pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran yang relevan, sehingga dosen pengampu mata kuliah dapat lebih profesional, pendidikan ideologi Pancasila lebih efisien dan efektif diimplementasikan.

4. Isu Serta Aksi Sosial

Dengan Penelitian ini memberikan wawasan baru bagaimana pendekatan, model pendidikan ideologi Pancasila melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum kurikulum di Perguruan Tinggi diimplementasikan, sehingga dapat membentuk warga negara Indonesia yang bukan hanya cerdas tetapi juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan disertasi ini terdiri dari lima bab, pada bagian bab 1 Pendahuluan ini, berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi. Bab 2 Kajian Pustaka, berisi tentang kajian pustaka terkait pendekatan pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah wajib umum kurikulum di Perguruan Tinggi. Pada bagian ini mengkaji terkait pendidikan umum atau *general education*, pendekatan dan model pendidikan ideologi

Pancasila, substansi atau materi pendidikan ideologi Pancasila, implementasi Pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta keterkaitan pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter warga negara Indonesia yang berdasarkan pada ideologi dan dasar negara Pancasila. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan acuan atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, subyek dan obyek dari penelitian ini, teknik pengumpulan data, dan bagaimana analisis data dalam penelitian ini dilakukan. Berikutnya bab 4 Temuan dan Pembahasan, pada bab ini berisikan hasil temuan-temuan di lapangan dan pembahasan yang berkaitan dengan pendekatan pendidikan ideologi Pancasila, muatan materi atau substansi pendidikan ideologi Pancasila, keterkaitan pendidikan ideologi Pancasila dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, dan implementasi pendidikan ideologi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun keadaban, karakter warga negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pada bagian terakhir adalah bab 5 Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan bagaimana pendekatan pendidikan ideologi Pancasila dalam mengembangkan kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Implikasi yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, serta rekomendasi penting bagi pengelola mata kuliah wajib umum, Perguruan Tinggi, dosen pengampu mata kuliah, mahasiswa, dan pemegang kebijakan pendidikan dalam menginternalisasikan, mensosialisasikan dan membudayakan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan pada akhir bab ini juga dirumuskan beberapa teori atau dalil-dalil dalam penelitian ini.